Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 5860-5871

PENGUATAN *HUMAN SECURITY*: STRATEGI SULAWESI UTARA SEBAGAI WILAYAH STRATEGIS DI BIBIR PASIFIK

Harsen Roy Tampomuri[1], Yuni Murni Tampomuri[2]
Program Studi Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia [1],
Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta [2]
Corresponding Author **Harsen Roy Tampomuri**: „ e-mail: harsen.roy@ui.ac.id

Published: Januari 2026

ABSTRACT
Pergeseran geopolitik Asia-Pasifik menempatkan Sulawesi Utara sebagai wilayah terdepan bibir Pasifik yang menghadapi ancaman non-tradisional seperti perubahan iklim dan ketimpangan Barat-Timur Indonesia, di mana studi existing kurang integrasi holistik human security-geostrategi. Penelitian kualitatif studi kasus instrumental ini mengelaborasi penguatan human security sebagai strategi pengelolaan, mengkorelasikan Indeks Pembangunan Manusia dengan posisi geostrategis. Populasi mencakup dokumen human security dan geostrategi Sulawesi Utara (1937-2025); purposive sampling pilih 20-30 sumber representatif hingga saturasi teoritis. Dokumen sekunder sebagai instrumen, dianalisis model Miles dan Huberman dengan coding tematik, triangulasi, dan content analysis. Hasil tunjukkan lokasi Pasifik perkuat hub perdagangan seperti KEK Bitung di tengah pergeseran kekuatan global yang butuh keseimbangan state-human security via pendidikan, kesehatan, ekonomi. Kesimpulan sarankan integrasi teori Ratulangi dengan human security Paris untuk pembangunan resilien berorientasi global yang seimbang militer-kesejahteraan

Kata Kunci: Asia-Pasifik, Geostrategi, Human Security, Sulawesi Utara, Pacific Rim

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Dinamika geopolitik global menunjukkan pergeseran kekuatan signifikan ke kawasan Asia-Pasifik, di mana negara-negara seperti China, India, dan ASEAN semakin mendominasi percaturan ekonomi dan politik, menggeser hegemoni Barat pasca-Perang Dingin. Provinsi Sulawesi Utara, sebagai wilayah terdepan Indonesia di bibir Pasifik, memiliki nilai strategis tinggi dalam konteks geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi, terletak di gerbang perdagangan dunia yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Asia Tenggara. Letak geografis ini, sebagaimana dikutip Napoleon bahwa kebijakan negara bergantung pada geografinya, menjadikan Sulawesi Utara lintasan krusial untuk pertahanan, keamanan, dan niaga, diperkuat oleh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung serta rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Pergeseran ini menciptakn multipolaritas dunia dengan munculnya kekuatan baru seperti India yang naik ke peringkat ketiga Asia Power Index 2025, serta eskalasi perang dagang AS-China yang mendorong aliran investasi ke Asia Tenggara hingga 78% antara 2018-2025. Di kawasan Pasifik, isu non-tradisional seperti bencana alam, ketahanan pangan, kesehatan, dan perubahan iklim semakin mendominasi, memerlukan pendekatan human security yang mengintegrasikan keamanan manusia dengan pembangunan berkelanjutan. Pemikiran Sam Ratulangi dalam "Indonesia in den Pacific" (1937) tentang perserangkaian wilayah, local resilience, dan pembangunan berorientasi global tetap relevan, namun tantangan kontemporer seperti ketimpangan Kawasan Barat-Timur Indonesia serta rendahnya pemanfaatan potensi Sulawesi Utara menimbulkan kerentanan strategis.

Meskipun literatur seperti Sarundajang (2011) menyoroti geostrategi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Asia-Pasifik dan Sanak (2012) membahas human security di perbatasan, kajian ini masih terbatas pada aspek sektoral tanpa integrasi holistik. Studi terkini menunjukkan ASEAN lambat

mengadopsi human security gender-responsif, sementara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulawesi Utara 2025-2044 belum sepenuhnya mengincorporate dimensi keamanan manusia multidimensi di tengah risiko cyber dan iklim. Akibatnya, pengelolaan wilayah strategis Sulawesi Utara rentan terhadap ancaman internal-eksternal, memerlukan strategi baru yang menggabungkan state security dengan prosperity.

Penelitian ini bertujuan mengelaborasi penguatan human security sebagai strategi pengelolaan Sulawesi Utara, menggunakan teori human security (Paris, 2001) dan geostrategi (Grygiel, 2006; Ratulangi, 1982) dengan metode kualitatif multidisiplin untuk menghasilkan solusi kontekstual. Urgensinya terletak pada posisi Sulawesi Utara sebagai hub perdagangan Pasifik di era Society 5.0, di mana integrasi keamanan-kesejahteraan esensial menghadapi pergeseran kekuatan global dan risiko multi-dimensi. Kebaruannya menawarkan pendekatan instrumental case study yang mengkorelasikan Indeks Pembangunan Manusia dengan geostrategi, melampaui literatur sebelumnya dengan fokus holistik pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sebagai modal ketahanan lokal.

METODE

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental, sebagaimana didefinisikan oleh Creswell (2014) yang menekankan eksplorasi mendalam terhadap kasus spesifik untuk mengungkap fenomena unik, yaitu penguatan human security sebagai strategi geostrategis bagi Provinsi Sulawesi Utara sebagai wilayah terdepan di bibir Pasifik. Pendekatan ini selaras dengan Sugiyono (2019) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif-induktif untuk memahami konteks holistik, di mana lokus penelitian difokuskan pada Sulawesi Utara dengan perspektif multidisiplin yang mengintegrasikan ilmu politik, ekonomi, dan keamanan, sebagaimana dielaborasi oleh Barbel Tress, Gunther Tress, dan G. Fry (2005) dalam kerangka studi kasus instrumental untuk menunjukkan sesuatu yang khas dan berbeda dari objek lain. Metode ini diperkuat oleh Emzir (2019) yang membedakan studi kasus instrumental sebagai alat untuk menggeneralisasi teori human security (Paris, 2001) dan geostrategi (Grygiel, 2006) dalam pengelolaan wilayah strategis, dengan data sekunder dari studi kepustakaan untuk menginventarisasi buku, jurnal, laporan, dan berita media terkait dinamika Asia-Pasifik pasca-Perang Dingin.

Instrumen penelitian mencakup dokumen sekunder seperti literatur geostrategi Sam Ratulangi (1982), laporan UNDP tentang human security, dan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang relevan dengan dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sebagaimana direkomendasikan oleh Sudaryono (2020) untuk instrumen kualitatif berbasis triangulasi sumber guna validitas. Teknik analisis data mengikuti model Miles dan Huberman (2014) yang diadaptasi Creswell (2014), meliputi reduksi data melalui kategorisasi indikator human security (keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, sosial-budaya, politik), display data dalam matriks geostrategis, dan penarikan kesimpulan melalui korelasi IPM dengan posisi Sulawesi Utara sebagai hub Pasifik, termasuk pemetaan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung (Peraturan Pemerintah No. 32/2014). Analisis ini bersifat interpretatif dengan pendekatan content analysis kualitatif ala Emzir (2019), yang mengolah data naratif untuk mengidentifikasi pola ancaman non-konvensional seperti ketimpangan KBI-KTI dan pergeseran kekuatan global, memastikan reliabilitas melalui audit trail dan peer debriefing.

Populasi penelitian terdiri dari seluruh dokumen dan publikasi relevan tentang Sulawesi Utara dalam konteks human security dan geostrategi sejak 1937 hingga 2025, mencakup karya Sam Ratulangi, Sarundajang (2011), Sanak (2012), serta laporan terkini seperti Human Security Outlook 2025. Sampel dipilih secara purposive sampling sesuai Sugiyono (2019), fokus pada 20-30 sumber utama yang representatif seperti jurnal peer-reviewed, buku akademik, dan data resmi BPS Sulawesi Utara, dengan kriteria inklusi berbasis relevansi tematik (human security, geostrategi Pasifik) dan kedalaman analisis, mirip teknik snowball sampling dalam studi perbatasan human security. Ukuran sampel dibatasi hingga saturasi teoritis, sebagaimana dijelaskan Sudaryono (2020), untuk menghindari bias dan memaksimalkan generalisasi kontekstual terhadap strategi pengelolaan wilayah.

Prosedur penelitian mengikuti tahapan sistematis Creswell (2014): (1) identifikasi masalah melalui review literatur awal tentang posisi strategis Sulawesi Utara; (2) pengumpulan data sekunder via akses database Google Scholar, repositori universitas, dan situs resmi pemerintah; (3) pengolahan data dengan coding tematik (open, axial, selective) sesuai Emzir (2019); (4) interpretasi melalui

triangulasi dengan teori Ratulangi (perserangkaian, local resilience, outward-looking) dan indikator Paris (2001); serta (5) validasi dan pelaporan hasil untuk rekomendasi kebijakan. Proses ini berlangsung iteratif selama 6 bulan, dengan etika penelitian menjunjung integritas akademik dan aksesibilitas DOI aktif seperti untuk referensi terkini 2021-2025, memastikan kontribusi multidisiplin bagi penguatan human security Sulawesi Utara.

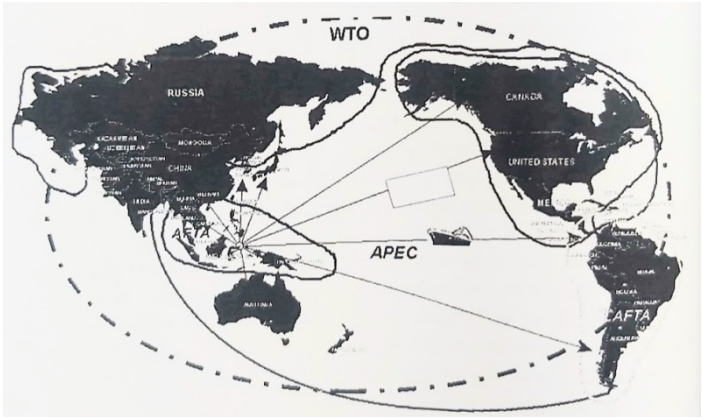
HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi Strategis Sulawesi Utara di Bibir Pasifik

Asia Pasifik adalah wilayah yang mencakup negara bangsa yang terletak disebagian dari benua Asia di pesisir pantai Asia Timur, Asia Tenggara, Australia di dekat Lautan Pasifik, yang mencakup negara-negara Rusia, China, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina, Australia, Papua New Guinea, Timor Leste, ditambah dengan negara-negara di Laut Pasifik (Oceania), seperti Samoa, Fiji, New Kaledonia, Vanuatu, New Zealand, dan negara-negara di pinggir Timur Lautan Pasifik dengan memasukkan negara-negara seperti Kanada, AS, Meksiko, Chili dan Peru. Dimasukkannya negara-negara di kawasan Oceania seperti Australia dan New Zealand adalah berdasarkan relasi ekonomi di antara negara-negara tersebut dan mitra dagang mereka di wilayah Asia Timur hingga ke Utara. Di kawasan ini telah tumbuh dan berkembang kerja sama ekonomi baik antaranegara tetangga seperti ASEAN di Asia Tenggara, maupun kerja sama dalam lingkup yang lebih luas seperti APEC (Sarundajang, 2011:124).

Lautan Pasifik atau sering disebut Samudera Pasifik berasal dari kata bahasa Spanyol *Pacifico,* yang berarti tenang atau damai. Lautan ini merupakan lautan terbesar di dunia, yang cakupannya sekitar sepertiga dari luas bumi, dengan luas sebesar 179,7 juta km² (69,4 juta mil²). Panjangnya sekitar 15.500 km (9.600 mil) mulai dari Laut Bening di Artik sampai batasan es di Laut Ross Antartika yang terletak di Kutub Selatan. Lautan Pasifik dari barat ke timur sangat luas, yaitu mulai dari 5° derajat garis lintang, sekitar 19.800 km (12.300 mil) mulai dari wilayah Indonesia sampai ke pesisir Kolombia. Batas sebelah barat lautan ini dimulai dari Selat Malaka, titik paling bawah permukaan bumi – Palung Mariana juga berada di Lautan Pasifik. Samudera Pasifik memiliki sekitar 25.000 kepulauan, dimana 17.500 pulau berada di wilayah Indonesia. Meski disisi lain lautan Pasifik ini tidak selamanya tenang karena sering juga terjadi angin rebut dan gempa bumi.

Secara umum dapatlah disimpulkan bahwa letak geografis kawasan Asia Pasifik memberikan nilai strategis karena memiliki banyak potensi dan hal baik bagi perkembangan negara-negara yang menjadi bagian di dalamnya baik saat ini maupun pada masa yang akan datang. Ada relevansi dengan pemikiran Sam Ratulangi dalam melihat posisi Indonesia di Pasifik. Posisi strategis ini menjadi salah satu faktor yang menentukan Indonesia dalam pergaulan ekonomi politik internasional, begitu juga dengan Sulawesi Utara. Sulawesi Utara sebagai bagian dari Indonesia dan berada di Bibir Pasifik sehingga menjadi jalur perdagangan dunia yang sangat prospektif. Apalagi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kini hadir di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 dengan total area seluas 532 ha. Dalam perkembangan terkini, rencana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur yang dekat secara geografis dengan Sulawesi Utara turut berkontribusi positif pada nilai strategis posisi Sulawesi Utara.



Gambar 1. Sulawesi Utara di Pasifik dan Dunia
Sumber: Sarundajang (2008)

Jika dilihat dari gambar di atas, jelas Sulut relatif lebih dekat ke beberapa pusat pertumbuhan ekonomi dunia, seperti Jepang, China, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia Timur, Kanada, AS dan Amerika Latin. Sulut berada tepat di tengah-tengah pusaran kegiatan perekonomian dunia, mulai dari kegiatan kerja sama di dalam kawasan BIMP-EAGA, kemudian kerja sama ASEAN, APEC, dan dalam lingkup dunia *World Trade Organization* (WTO). Ditambah lagi akses ke kota-kota utama di kawasan Asia Pasifik yang menjadi pusat perdagangan di kawasan masing-masing seperti Tokyo, di Jepang, Manila di Filipina, Seoul di Korea Selatan, Shanghai dan Hongkong di China (RRT), Hanoi dan Saigon di Vietnam Singapura, kota-kota di Kanada, AS dan Amerika latin. Kawasan-kawasan tersebut dapat dijadikan mitra dagang maupun sumber investasi untuk Sulut karena globalisasi telah menimbulkan paradigma baru yaitu *co-opetition (cooperation-competition)* di mana hubungan kerja sama antarnegara sangat diperlukan (Sarundajang, 2011:125).

Sulawesi Utara dengan lokasi yang strategis, diperhadapkan juga dengan era globalisasi kini yang telah bertransformasi ke era yang serba digital baik melalui perkembangan *industrial revolution 4.0* maupun *society 5.0*. Sehingga dibutuhkan inovasi agar berbagai produk kebijakan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Era globalisasi saat ini menciptakan interdependensi sebagai sebuah keniscayaan, dimana sukses tidaknya negara dalam menjalankan pemerintahannya tidak hanya mengandalkan sumber daya domestik. Semisal dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan, negara juga bergantung dan atau dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh negara lain. Demikian juga interpenetrasi yang hadir dan memungkinkan kekuatan global mempengaruhi konstelasi domestik suatu negara. Sebaliknya dinamika lokal/domestik suatu negara dengan berbagai kebijakan internalnya dapat turut mempengaruhi negara yang lain.

Pergeseran Kekuatan Global dan Geostrategi Sulawesi Utara

Posisi geografis Indonesia yang berada di persilangan dua samudera dan dua benua, serta susunan demografis dan sistem sosial politik yang dianut merupakan aspek-aspek dari faktor dalam negeri yang mempengaruhi cara pandang dan cara Indonesia memposisikan diri dalam percaturan internasional. Memasuki abad ke-21, dunia masih terus mengalami perubahan-perubahan cepat dan mendasar diberbagai bidang yang pada gilirannya mengakibatkan berlanjutnya proses transformasi luas pada peta politik ekonomi global dan pola hubungan antar negara. Menurut Wuryandari (2016), sampai dengan pertengahan dekade 1980-an belum muncul gejala yang menunjukkan dunia akan mengalami perubahan dan perkembangan cepat sebagaimana yang dialami sekarang ini. Orang masih percaya bahwa persaingan ideologis dua kekuatan besar, yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dikuasai oleh Uni Soviet, masih akan terus mendominasi percaturan politik internasional.

Goyahnya dominasi kekuatan Uni Soviet di Eropa Timur pada tahun 1989, runtuhnya tembok Berlin yang memisahkan dua negara Jerman pada tahun 1990, yang kemudian diikuti dengan tumbangnya rezim-rezim sosialis di Eropa dan bubarnya eksistensi negara Uni Soviet tahun 1991. Berakhirnya Perang Dingin yang dramatis menandai berbagai perubahan signifikan diarena politik internasional. Pasca Perang Dingin, muncul berbagai isu baru dalam hubungan antar negara seperti gerakan demokratisasi, hak asasi manusia, lingkungan, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governancei),* kejahatan lintas nasional, keamanan energi dan ketahanan pangan nasional menjadi *concern* baru secara global. Pendekatan keamanan melalui cara-cara militeristik tidak lagi menjadi opsi utama, pendekatan non-militer dan jalur diplomasi kian menjadi pilihan. Diplomasi juga kita tidak hanya mengandalkan *first track diplomacy* dengan aktor-aktor negara (*state actor*) saja tetapi juga *second track diplomacy* dengan hadirnya aktor-aktor non-negara bahkan *multi/total track diplomacy* yang melibatkan berbagai pihak.

Kekuatan-kekuatan baru bermunculan dalam percaturan ekonomi dan politik internasional, tidak lagi bipolar dan unipolar karena tatanan dunia kini menjadi multipolar. Jepang, China dan India mulai beratraksi dengan kekuatan dan pengaruhnya di Asia Pasifik. Ambisi China sebagai kekuatan adidaya baru juga tampak dalam persiapan dan kesiapan negara tersebut untuk melakukan reformasi progresif dalam kekuatan militernya. Anggaran militer China mengalami kenaikan yang luar biasa, semisal pada tahun 2007 mengalami kenaikan 17,8 persen (kenaikan sebesar US$ 44,94) dibandingkan

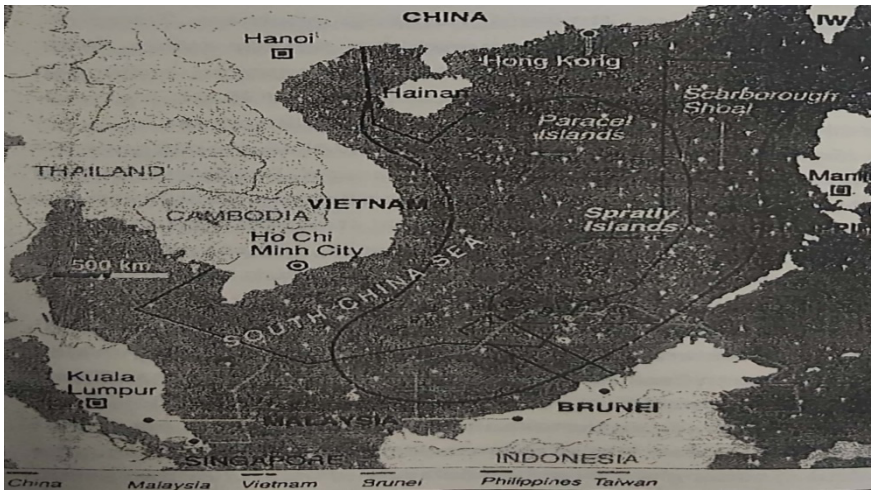
dengan anggaran tahun sebelumnya 2006 yang hanya naik 14,7 persen dibandingkan dengan tahun 2005 (Ratna, 2007). Perubahan yang signifikan dalam ekonomi dan militer China menimbulkan kekhawatiran dan kontroversi di kawasan. Namun pada sisi yang lain, perubahan tersebut merupakan hak prerogatif China dalam melindungi dan mencapai kepentingan nasionalnya.

Demikian halnya dengan Jepang dan China, eksistensi India dalam konstelasi politik regional bahkan internasional juga menjadi kian signifikan, baik dilihat dari perspektif politik-strategis maupun perspektif ekonomi. Tampilnya India dengan kekuatan nuklir, apapun argumentasinya telah memberi pengaruh besar bagi stabilitas kawasan bahkan terhadap perimbangan kekuatan global (Wuryandari, 2016). Begitu juga dengan perkembangan dan inovasi teknologi dunia, India hadir dengan kemajuan yang signifikan. Jika kita melihat survei yang dilakukan oleh perusahaan media massa multinasional Bloomberg, survei yang melibatkan dua ribu profesional di 20 wilayah menunjukkan bahwa mayoritas responden memperkirakan Tiongkok dan India bakal menjadi pusat inovasi teknologi dunia pada 2035.

Para profesional di Beijing, Tiongkok dan New Delhi, India memandang bahwa pergerakan mereka merebut peluang yang diwakili oleh kekuatan pasar dan kemajuan teknologi, arus baka dan modal akan mempercepat kenaikan ekonomi baru. Beberapa perubahan ekonomi diantaranya penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), transaksi secara non tunai, emansipasi perempuan, dan perang dunia maya serta perubahan iklim akibat adopsi teknologi (Setyowati, 2019). Merujuk *Global Strategic Trends – Out to 2040* edisi keempat, yang merupakan hasil kajian Tim Peneliti dari *Development, Concepts and Doctrine Centre,* Kementerian Pertahanan Inggris; era 2040-an akan menjadi masa transisi. Kemungkinan akan ditandai dengan ketidakstabilan, baik dalam hubungan antarkelompok dalam negara.

Selama jangka waktu tersebut, dunia menghadapi realitas perubahan iklim, pertumbuhan penduduk yang cepat, kelangkaan sumberdaya, kebangkitan ideologi, dan pergeseran kekuatan global dari Barat ke Timur. Distribusi kekuasaan global akan berubah, hingga tahun 2040, lokus kekuasaan global akan menjauh dari AS dan Eropa menuju Asia, sebagaimana sistem global bergeser dari unipolar menuju distribusi kekuatan unipolar. Diabad pertama masehi, Asia menyumbang hingga 76,3 persen produk domestik bruto global. Eropa Barat pada waktu ini hanya 10,8 persen. Ditahun 1.000 Masehi, kontribusi Eropa Barat pada PDB global adalah 8,7 persen. Sebaliknya Asia turun sedikit 70,3 persen. Keseimbangan ini mulai bergeser dengan Revolusi Industri. Ditahun 1820, andil Eropa Barat naik hingga 23,6 persen, sementara Asia turun sampai 59,2 persen. Disekitar masa ini, 'ranting' Barat dengan tingkat PDB yang signifikan, (maksudnya disini Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru), mulai terbentuk.

Ditahun 1820 kelompok ini hanya menyumbang 1,9 persen dari PDB global, tetapi pada 1998 "ranting" ini mencatatkan angka lebih sedikit di atas 25 persen dari PDB dunia. Kontribusi Eropa Barat adalah 20,6 persen di tahun 1998, sementara kontribusi Asia secara global hanya 37,2 persen. Dihampir sepanjang sejarah yang terekam, Asia, tempat bagian terbesar penduduk dunia berdiam, pernah dan telah memberi sumbangan terbesar pada ekonomi dunia (Maddison, 2007). Berikut konflik yang terjadi, perebutan sumber energi kini bergeser ke Asia Tengah, Laut Hitam dan Laut China Selatan. Sengketa teritori di LCS memperebutkan gugusan pulau yaitu Pulau Pratas, Kepulauan Paracel, Scarborough Reef dan Macclesfield Bank, serta Kepulauan Spratly. Kawasan yang memiliki nilai strategis serta potensi sumber daya perikanan laut dan hidrokarbon.



Gambar 2. Konflik Garis Perbatasan di Laut China Selatan
Sumber: EIA, *Middlebury College, NG, CIA Factbook*

Klaim persaingan yang tengah berlangsung atas kedaulatan pulau-pulau, perairan teritorial terkait, dan asal Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) telah menghasilkan sengketa yang luas dan rumit. Hal ini termasuk sengketa nama. Tiongkok menyebut wilayah maritim ini "Laut Selatan" (*Nan Hai*), Vietnam menyebutnya "Laut Timur" (*Bien Dong*), sedangkan Filipina menyebutnya "Laut Filipina Barat" *(Dagat Kanlurang Pilipinas*). Sengketa melibatkan Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, serta Tiongkok (RRT) dan Republik China (Taiwan) (Priyono, Juniawan; Yusgiantoro, Purnomo, 2017). Berbagai kekuatan luar juga ramai diperairain ini seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris, India, Jepang dan Australia. Elisabeth, Mashad, Wuryandari, Muda dan Sriyano (2016) mengemukakan enam perubahan mendasar terkait hubungan antarnegara dalam tatanan baru:

1. Adanya perubahan dalam konstelasi politik global dari pola bipolar ke multipolar,
2. Menguatnya saling kebergantungan antarnegara dan saling keterkaitan antara beragam masalah global yang mencakup aspek politik, ekonomi, keamanan, sosial, lingkungan hidup dan lain sebagainya,
3. Terjadinya peningkatan peran aktor-aktor non-negara dalam hubungan internasional,
4. Munculnya isu-isu global baru dalam agenda internasional,
5. Dunia internasional usai Perang Dingin dihadapkan pada semangat untuk dapat lebih besar memperhatikan persoalan-persoalan keamanan yang terkait dengan keamanan manusia,
6. Usai persaingan Timur dan Barat, dunia lebih dihadapkan pada perdebatan Utara-Selatan yang semakin menguat dalam upaya mencari solusi pembangunan dunia yang lebih berkeadilan.

Dalam korelasinya dengan pergeseran kekuatan global, kini *sea power* Indonesia tidak dapat berdiri sendiri seperti era Sriwijaya dan Majapahit eksis di lautan. Kejayaan Indonesia sebagai negara kepulauan sangat ditentukan oleh konsep kesatuan seluruh komponen kekuatan nasional dalam mengeksplorasi sumber daya nasional. Artinya *sea power* tidak hanya armada kapal perang saja, tetapi juga mencakup segala potensi kekuatan nasional yang menggunakan laut sebagai wahananya, seperti penegak hukum di laut, armada kapal niaga, pelabuhan, laboratorium, serta industri dan jasa maritim (Priyono, Juniawan; Yusgiantoro, Purnomo, 2017).

Marsetio (2014) berpendapat dalam *sea power* mutlak harus ada aspek-aspek non-militer, seperti perdagangan lewar laut, perkapalan, perikanan, asuransi maritim, dan industri pembangunan kapal. Jika semua aktivitas tersebut dilakukan dalam kerangka kebijakan pemerintah dan menjadikannya sebagai kepentingan nasional yang utama, maka arah Indonesia menuju negara maritim dan Poros Maritim Dunia sudah tepat. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sejak dahulu hingga kedepan adalah bagaimana melahirkan karakter Pemerintah yang pro maritim. Posisi geografis

Indonesia merupakan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain, baik dari segi geoekonomi, geopolitik maupun geostrategi. Meski Indonesia mendapatkan keuntungan yang sangat prospektif dari letak geografisnya, menurut Marsetio bahwa Indonesia juga dalam posisi yang rentan akan ancaman keamanan maritim.

Selanjutnya, futurolog abad ke-20 Sam Ratulangi menyampaikan pemikirannya terkait arti Indonesia bagi Asia Pasifik dan bagi ekonomi dunia dimana pada umumnya mengandung tiga hal yang bersifat pasif, yaitu sebagai negara konsumen (impor), negara sumber bahan mentah (ekspor), dan negara tempat menanamkan modal (Ratulangi, 1982:137). Sam Ratulangi dalam pidatonya yang berjudul *Verarmings Factoren* (Faktor-faktor yang memiskinkan Indonesia), diuraikan bahwa ekspor kita tergantung dari pasar luar negeri, namun yang lebih penting adalah bagaimana memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia atas barang-barang industri yang diproduksi di dalam negeri. Menurut Sam Ratulangi, bahan-bahan yang meninggalkan negeri Indonesia sebagian besar kembali lagi setelah diolah di luar negeri. Indonesia merupakan pasar bagi barang-barang impor dari negara-negara industri.

Jika dilihat dari kondisi sekarang ini, apa yang dianalisis oleh Sam Ratulangi benar menjadi kenyataan ketika Indonesia menjadi negara konsumen dari negara-negara industri dengan sumber bahan mentah yang kaya dan tempat berbagai negara berinvestasi. Indonesia tercatat peringkat ke empat dalam peringkat negara terbaik untuk berinvestasi pada tahun 2020 versi Bank Dunia Group dengan empat faktor unik yakni indeks korupsi, lingkungan pajak, stabilitas ekonomi, kebebasan wirausaha, invasi, tenaga kerja terampil dan keahlian teknologi, infrastruktur, perlindungan investor, birokrasi, dan kualitas hidup. Indonesia memiliki sokongan sekitar 650 emiten (perusahaan terbuka) di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan kapasitas pasar melebihi US$ 500 milar atau Rp. 7.350 triliun. Begitu juga potensi demografi yang dimiliki dengan total 260 juta penduduk (Saleh, 2020).

Melihat kondisi dan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, maka orientasi pembangunan harus diarahkan pada sinergitas dan interkonektivitas pembangunan antara daratan dan lautan. Karena sejak Indonesia merdeka, paradigma pembangunan cenderung berorientasi daratan, sehingga mengakibatkan munculnya ketimpangan pembangunan antarkawasan, yaitu antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang relatif tertinggal (Sarundajang, 2011). Sinergitas pembangunan antarkawasan, khususnya di KTI dengan Sulut sebagai *hub* dan pusat distribusi barang dan jasa. Dalam konteks pengembangan KTI, Sulut dari aspek geostrategi, berpotensi sebagai pusat distribusi perdagangan nasional, regional, dan internasional.

Sumberdaya daerah dibeberapa daerah KTI yang dapat dikembangkan secara sinergis-interkoneksitas dengan geostrategi Sulut yang berperan sebagai pintu gerbang dan provinsi-provinsi di KTI sebagai *feeder* berbagai produk unggulan sesuai potensinya untuk diekspor ke luar negeri. Sulut memiliki potensi sumber daya alam unggulan, yaitu sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan serta pariwisata. Disamping potensi sumberdaya alam tersebut, Sulut juga memiliki potensi unggulan disektor pariwisata, baik wisata alam, wisata budaya, dan wisata religi. Disektor perdagangan, Sulut masih mempunyai peluang yang sangat besar sebab ada nilai tambah kegiatan ekspor Sulut baik antar provinsi dan antarnegara secara tahunan. Provinsi Sulut juga memiliki dukungan infrastruktur bandar udara dengan 6 (enam) bandar udara yaitu:

1) Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi
2) Bandar Udara Meonguane
3) Bandar Udara Miangas
4) Bandara Udara Bolaang (dalam pembangunan)
5) Bandar Udara Naha
6) Bandar Udara Siau (dibangun sejak 2014 dan persiapan untuk beroperasi).

Sulut memiliki bandara internasional dengan jalur penerbangan ke luar negeri seperti ke Kuala Lumpur (Air Asia), Nanjing (Charter Citilink), Davao (Garuda Indonesia), Changsha, Fuzhou, Guangzhou, Nanjing, Shanghai-Pudong, Tianjin (Charter Lion Air), Kuala Lumpur (Malaysia Airlines), Singapura (Scoot), dan Bangkok-Don Mueang (Thai Lion Air). Selain itu ada juga Garuda Indonesia yang mengangkut kargo "*direct call*" atau ekspor langsung dari Bandara Internasional Sam

Ratulangi ke Bandara Narita, Tokyo, Jepang. Informasi dari General Manager Garuda Indonesia Manado, Vonny F. Pinontoan bahwa sampai dengan bulan Maret 2021, sudah ada 23 kali ekspor dengan total ekspor mencapai 356,2 ton dengan didominasi produk perikanan seperti tuna. Selain itu ada hasil pertanian dan "*general cargo*". Penerbangan kargo langsung dari Manado ke Haneda, Tokyo juga sudah ada dan dapat dimanfaatkan untuk memuat produk-produk lainnya dari Sulut seperti pala, olahan hasil kelautan dan pertanian yang bisa meningkatkan penetrasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dipasa ekspor.

Peran pemerintah daerah dan masyarakat khususnya pelaku usaha perlu untuk memaksimalkan posisi strategis Sulut berikut berbagai fasilitas infrastruktur serta berbagai kerja sama antar negara. Semisal kerja sama Indonesia-Jepang baik bilateral maupun multilateral. Dalam level bilateral Indonesia-Jepang memiliki kerja sama IJ-EPA sedangkan regional keduanya terjalin kerja sama *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP) dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Ada banyak perjanjian perdagangan yang sudah ditandatangani dan sedang dilanjutkan perundingannya dengan berbagai negara. Hal ini menjadi langkah yang positif untuk melihat pasar global dan tidak hanya melibatkan diri sebagai daerah dan negara konsumen. Ekspor bahan baku mentah harus terus dikurangi dan minimal ekspor dalam bentuk bahan setengah jadi serta sebisa mungkin bahan jadi untuk memberikan nilai tambah yang besar bagi Sulawesi Utara bahkan bagi Indonesia.

Dalam hal telekomunikasi, hampir semua wilayah di daerah ini relatif bisa dijangkai oleh fasilitas telpon termasuk untuk sambungan internasional. Disamping itu telah dibangun jaringan telepon seluler dengan berbagai layanan yang diberikan oleh *provider*. Sedangkan untuk transportasi darat, relatif sudah menjangkau daerah-daerah di Sulut. Eksistensi jalan Trans-Sulawesi sebagai jalur transporasi darat yang menghubungkan provinsi Sulut dengan provinsi lainnya di wilayah Sulawesi. Selain *Ring Road I* dan *Ring Road II,* Sulawesi Utara juga sudah memiliki jalan tol Manado-Bitung yang direncanakan terintegrasi dengan kawasan industri dan pariwisata sehingga dapat mendukung peningkatan perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung. Pada waktu yang bersamaan juga memberikan dukungan terhadap pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Manado – Bitung – Likupang.

Hampir semua wilayah di daerah relatif bisa dijangkau oleh fasilitas listrik, meski saat ini masih sangat tergantung pada tenaga disel. Namun pengembangan EBT (Energi Baru Terbarukan) kini mulai menjadi perhatian pemerintah dengan dimasukkannya EBT dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sulut memiliki banyak potensi EBT seperti panas matahari (tenaga surya). air, angin (bayu), biogas dan panas bumi. Seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Winuri, Likupang dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sangihe, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tanggari dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTB) Lahendong. Posisi Sulut akan makin strategis dengan berpindahnya ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dengan jarak yang makin dekat dengan ibukota negara, secara otomatis akan memangkas anggaran transportasi yang harus dikeluarkan. Sulut juga bisa menjadi penyokong ibukota negara yang baru dalam hal bahan-bahan kebutuhan dari hasil pertanian dan perikanan, tenaga kerja, jasa dan kebutuhan lainnya.

Hal ini diperkuat dengan ikatan kultural dan interaksi antara warga Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur yang sudah terjalin lama. Banyak warga Sulut yang sudah sejak dulu bekerja di Kalimantan Timur khususnya Balikpapan. Disisi pertahanan keamanan, dengan adanya pemindahan Ibukota Negara akan menjadi kesempatan untuk memperkuat pertahanan keamanan (militer) diwilayah Indonesia bagian utara baik perbatasan darat dengan negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam tetapi juga perbatasan laut dengan Filipina. Ibukota pastinya dikondisikan dengan kekuatan pertahanan keamanan yang tidak mudah diinvasi oleh pihak asing dan lebih siap menghadapi potensi ancaman luar (*external threat*). Pemindahan ibukota akan mengusik jalur perlintasan (pelarian) kelompok teroris Abu Sayyaf Group (ASG) dan ISIS serta mengamankan wilayah perbatasan karena perubahan pusat pertahanan militer Indonesia. Secara bersamaan, Sulut akan mendapatkan dampak positif dalam hal pertahanan keamanan sebagai provinsi yang berada di perbatasan negara.

Penguatan *Human Security*

Hubungan antar negara dalam tatanan baru terlihat adanya peningkatan peran aktor-aktor non negara (*non state actors*). Begitu juga dengan isu-isu global baru yang hadir mewarnai agenda internasional. Konstelasi dunia internasional pasca Perang Dingin dihadapkan pada semangat untuk dapat memperhatikan problematika keamanan yang terkait dengan keamanan manusia (*human security*). Dalam upaya pengembangan dan strategi pengelolaan wilayah-wilayah strategis negara, disamping fungsi pertahanan-keamanan, ada fungsi penting lainnya yang menjadi prioritas yakni fungsi kesejahteraan (*prosperity*). Sulut sebagai pintu gerbang negara di bagian utara Indonesia merupakan daerah dengan letak geografis yang sangat strategis. Posisi yang strategis memungkinkannya untuk berinteraksi dalam berbagai agenda dengan negara-negara tetangga, khususnya berbagai kerja sama yang mendorong keamanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 3. Konsep Penguatan *Human Security* di Sulawesi Utara
Sumber: Harsen Roy Tampomuri (2022)

Orientasi dalam mengelola Sulawesi Utara sebagai wilayah yang strategis di Bibir Pasifik bisa dilihat dari dua pendekatan yakni: 1) keamanan wilayah negara dengan pengandalan kekuatan militer, dan 2) keamanan manusia yang diletakkan sebagai faktor kunci kemajuan negara. Penguatan *human security* sebagai strategi bagi Sulawesi Utara dimaknai sebagai sebuah pendekatan baru yang tidak lagi mengutamakan keamanan tradisional dengan pengandalan kekuatan militer. Keamanan manusia atau masyarakat Sulawesi Utara melalui pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta sektor-sektor penting lainnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang merupakan hakekat dari keamanan negara. Ketiga indikator tersebut menjadi rujukan penting bagi strategi penguatan keamanan manusia.

Keamanan manusia menekankan aspek kesejahteraan manusia sebagai modal dari keamanan. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Sulut dapat didorong dari aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Sanak (2012) mengemukakan bahwa manusia dengan kapasitas ekonomi, kapasitas intelektual dan kesehatan, serta kapasitas sosial yang kuat dipandang sebagai modal utama dalam bernegara. Praktino (2009) berargumentasi bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari tiga indikator yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi memiliki kesejajaran dengan komponen-komponen *human security*. Ketiga indikator tersebut menjadi penjamin bagi keberlanjutan pembangunan sekaligus sebagai parameter kunci derajat *human security*. Dengan demikian, ketiga indeks dimaksud (pendidikan, kesehatan dan ekonomi) dapat mencerminkan dan mencakup aspek-aspek *human security*.

Ketika pembangunan pendidikan di Sulawesi Utara memadai maka kualitas wawasan dan pengetahuan masyarakat menjadi meningkat. Hal ini akan mendorong peran aktif masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan dan mendorong kawasan yang strategis menjadi semakin produktif. Pembangunan pendidikan diharapkan dapat membangun kualitas manusia Sulawesi Utara secara komprehensif baik intelektual, emosional dan mental serta keahlian dan kompetensi diri. Indikator kesehatan diwujudkan dengan ketersediaan infrastruktur kesehatan dan sumber daya manusia

kesehatan yang tujuan akhirnya adalah derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan indikator ekonomi diharapkan dapat didorong dalam pemanfaatan berbagai potensi dan kemampuan yang ada baik geografis, demografis dan sumber daya alam. Secara lebih konkrit, penghasilan dan pendapatan daerah secara kolektif dan masyarakat secara personal dapat meningkat.

Jika mengacu pada konsep pembangunan manusia dari beberapa ahli pembangunan, dapat disimpulkan bahwa Kesejahteraan atau kualitas hidup seseorang dikatakan baik jika hidup dengan kondisi pengetahuan atau pendidikan yang memadai, derajat kesehatan yang baik dan pengasilan yang mencukupi. Manusia Sulawesi Utara harus menjadi faktor kunci dalam pembangunan daerah dan negara dengan semua potensi wilayah. Harry Hikmad (2004) mengemukakan bahwa pembangunan masyarakat (*community building*) dimulai dari bawah (*bottom up*). Karena itu pembangunan masyarakat harus menempatkan masyarakat sebagai pelaksana (subyek) bukan semata-mata sebagai sasaran pembangunan (obyek). Jangan sampai meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan dari seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Hal ini bisa dilihat dari korelasi antara pertumbuhan ekonomi yang tidak serta merta meningkatkan indeks penghasilan seluruh masyarakat.

Hal ini sejalan dengan gagasan yang dikemukakan oleh Bjorn Hettne (2001) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu mengentaskan kemiskinan, karena itu diperlukan strategi pembangunan egalitarian bagi Sulawesi Utara yang lebih memprioritaskan redistribusi daripada pertumbuhan. Sarundajang (2011) mengemukakan bahwa meskipun secara umum perekonomian dan pertumbuhan ekonomi kawasan Pasifik terus meningkat, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum setara dengan rata-rata negara-negara kawasan Pasifik. Secara keseluruhan perekonomian belum menunjukkan kemajuan signifikan. Hal ini antara lain karena Indonesia belum berhasil memanfaatkan dinamika kemajuan ekonomi kawasan Pasifik secara optimal dan belum berhasil menggali dan mengoptimalkan potensi internal kawasan antara lain potensi keunggulan letak geografik dan geopolitik Indonesia, khususnya Sulawesi Utara yang berada di bibir Pasifik, sebagaimana yang diprediksi oleh Sam Ratulangi.

Oleh sebab itu, teori perserangkaian yang berbasis geostrategi wilayah, teori ketahanan lokal (*local resilience*) dan daya saing dalam konteks perdagangan global/internasional serta teori pembangunan berorientasi global (*outward*-looking) perlu diimplementasikan. Dari ketiga teori, Sam Ratulangi memunculkan implikasi pada pentingnya kebijakan pembangunan geostrategi sebagai *road map* menuju keunggulan dan kejayaan suatu bangsa atau daerah tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik-stratejik. Eddy Suharto (2005) menyebutkan bahwa pembangunan kesejahteraan melingkupi 3 (tiga) hal pokok yakni: peningkatan standar hidup, peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, serta perluasan aksesibilitas. Ketersediaan infrastruktur fasilitas publik dan aksesibilitas harus jalan beriringan sehingga tujuan hadirnya berbagai fasilitas publik dapat tercapai.

Adapun pendekatan keamanan negara dibutuhkan juga serta perlu dijalankan secara bersamaan. Jika aspek keamanan negara diabaikan maka akan mempengaruhi stabilitas dan kedaulatan negara. Disisi lain, ketika kesejahteraan menjadi timpang maka banyak kebutuhan hidup yang bisa dipenuhi dengan cara-cara yang dapat mengganggu keamanan secara internal. Titik tengah dari berbagai pendekatan untuk membangun suatu daerah sebagai bagian dari negara yakni pendekatan *state security* dan *human security* yang dijalankan secara bersamaan. Pendekatan keamanan secara komprehensif (Wuryandari, 2009) dengan berbagai kebijakan yang implementatif dan konsisten perlu dijalankan agar wilayah negara menjadi aman dari berbagai ancaman internal maupun eksternal. Kesuksesan dari penerapan *human security* di Sulut tetaplah dibutuhkan keseimbangan dengan pendekatan *state security*. Namun pada waktu yang bersamaan dibutuhkan juga kemampuan pemerintah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.

Sebagai daerah yang strategis dari posisi geografis, strategi yang diturunkan dalam berbagai kebijakan tidak boleh hanya bersifat *state centric* saja karena dibutuhkan pendekatan yang *civil/human centric* juga. Strategi *state security* benar dibutuhkan tetapi itupun tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai dinamika dan problematika dalam membangun daerah Sulut, pendekatan kesejahteraan perlu dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah pusat dan semua *stakeholder* terkait. Negara harus hadir di Sulawesi Utara, tidak hanya dengan berbagai upaya untuk menjaga keamanan teritorial

(kekuatan militer) tetapi juga pembangunan kesejahteraan. Nagy (2012) berpendapat bahwa sekarang ini daerah kekuasaan (*domain*) ditandai dengan penggunaan spektrum elektronik dan elektromagnetik untuk menyimpan, memodifikasi, dan mempertukarkan data melalui sistem jaringan dan infrastruktur fisik yang terkait – dikenal sebagai ranah maya – telah berkembang secara signifikan mempengaruhi geostrategi.

Kehadiran negara dan militer di ranah maya menjadi penting untuk mempertahankan kehadirannya di semua domain. Menempatkan kepentingannya dalam mendukung kekuatan darat dan laut setara dengan kekuatan udara dan ruang angkasa. Kekuatan ranah maya sangat penting bagi keamanan nasional yang dapat dibagi dalam dua kategori besar: pengamanan siber (*cyber security*), dan operasi informasi (*information operations*). Berkembangnya kepentingan akan infrastruktur informasi penting, internet dan jaringan informasi terkait, jaringan telepon seluler, bank, *e-governance*, dan lain-lain. Semua bagian dari jaringan informasi internasional dalam mendukung dan memelihara semua infrastruktur penting (transportasi, pembangkit, dan distribusi energi, distribusi air, penegakan hukum dan militer, dan lain-lain yang merupakan dasar berfungsinya negara) dan kerentanan nasional, menjadi alasan yang mendasar kebutuhan untuk menciptakan pengamanan siber nasional (Priyono, Juniawan; Yusgiantoro, Purnomo, 2017).

Dalam konteks keamanan manusia, pemenuhan berbagai aspek untuk penguatan *human security* bagi pembangunan suatu daerah dan negara sangatlah terkait dengan ranah maya. Konektivitas dan aksesibilitas dengan berkembangnya konsep digital ikut menentukan pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Seperti hairnya ruang berdagang baru yang muncul dalam bentuk *e-commerce* dengan berbagai inovasi kini menjadi ruang temu bagi aktivitas jual beli. Hadirnya ranah maya secara signifikan mempengaruhi berbagai sendi kehidupan dan tatanan dunia. Isu-isu baru dan aktor selain negara kini menandai perubahan tatanan dunia, begitu juga dengan ranah maya dengan revolusi industri 4.0 dan *society 5*.0 turut mengubah pola interaksi. Dalam kondisi ini, berbagai strategi tidak hanya harus bertumpuh pada *state actors* saja tetapi juga *non-state actors*. Jika mengacu pada konsep kebijakan, maka diperlukan juga tidak hanya *triple helix* dengan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Kini diperlukan juga *penta helix* dengan melibatkan perguruan tinggi dan media dalam berbagai strategi dan kebijakan selain pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa penguatan human security merupakan strategi esensial bagi Sulawesi Utara sebagai wilayah strategis di bibir Pasifik, dengan integrasi tujuh dimensi keamanan manusia (ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, sosial-budaya, politik) yang berkorelasi kuat dengan Indeks Pembangunan Manusia dan geostrategi Sam Ratulangi, termasuk perserangkaian wilayah, local resilience, serta outward-looking development, untuk memaksimalkan potensi KEK Bitung dan konektivitas Asia-Pasifik di era Society 5.0. Temuan utama menegaskan pergeseran paradigma dari state-centric ke human-centric security, di mana kesejahteraan masyarakat menjadi modal utama ketahanan wilayah menghadapi multipolaritas global, ketimpangan KBI-KTI, dan ancaman non-tradisional seperti cyber risks serta perubahan iklim, sebagaimana didukung data infrastruktur bandara internasional dan ekspor perikanan ke Jepang.

Meskipun demikian, keterbatasan penelitian terletak pada ketergantungan data sekunder tanpa wawancara primer, yang membatasi validasi empiris lapangan di perbatasan seperti Talaud-Sangihe, serta kurangnya analisis kuantitatif untuk mengukur dampak human security terhadap FDI pasca-pemindahan ibu kota. Saran bagi penelitian lanjutan mencakup pendekatan mixed-methods dengan survei longitudinal di KEK Bitung dan model simulasi geospasial untuk proyeksi 2040. Secara praktis, implikasi penelitian merekomendasikan kebijakan penta-helix (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, media) untuk sinergi state dan human security, termasuk pengembangan EBT dan e-commerce UMKM guna meningkatkan IPM Sulawesi Utara hingga 80 poin pada 2030, memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

REFERENSI

Barbel Tress, G., Tress, B., & Fry, G. (2005). *Conceptual framework for multidisciplinary landscape research*. [Details inferred from context as interdisciplinary study; full publication unavailable in file].

Bjorn Hettne. (2001). *Development theory and the three worlds*. [Longman; context on egalitarian development strategies].

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Eddy Suharto. (2005). *Pembangunan kesejahteraan sosial*. [Context on welfare development pillars].

Emzir. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. [Publisher unspecified; content analysis focus].

Grygiel, J. J. (2006). *Great powers and geopolitical change*. Johns Hopkins University Press.

Harry Hikmad. (2004). *Pembangunan masyarakat: Community building*. [Bottom-up development context].

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (3rd ed.). SAGE.

Paris, R. (2001). Human security: Paradigm shift or hot air? *International Security, 26*(2), 87–102. **https://doi.org/10.1162/016228801753212501.**

Praktino. (2009). [Work on Human Development Index alignment with human security components].

Ratulangi, G. S. S. J. (1982). *Indonesia di Pasifik: Analisa masalah-masalah pokok Asia-Pasifik*. Penerbit Sinar Harapan.

Sanak, Y. (2012). *Human security dan politik perbatasan*. Research Centre for Politics and Government, Universitas Gadjah Mada.

Sarundajang, S. H. (2011). *Geostrategi Sulawesi Utara menuju pintu gerbang Indonesia di Asia Pasifik*. KATA HASTA PUSTAKA.

Sudaryono. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif*. [Triangulation instruments context].

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.